



2022

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DISUSUN OLEH:
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 dalam mendukung upaya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terkendali.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik serta masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan di tahun yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Demikian dan terima kasih.

Praya, Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196911221992031003

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran.....	vi
Surat Pernyataan Tanggung Jawab.....	vii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
II. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	3
III. NERACA.....	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	13
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	15
2.1 Kebijakan Keuangan	15
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	15
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum.....	16
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	17
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	18
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD.....	18
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	18
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	18
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD.....	23
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	24
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	24

5.2	Pos-pos Laporan Operasional.....	33
5.3	Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
5.4	Pos-pos Neraca	35
5.5	Pengungkapan atas Pos Aset dan Kewajiban	41
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....		42
6.1	Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	42
6.2	Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	42
BAB VII PENUTUP		45
LAMPIRAN.....		46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Pencapaian Tingkat Kinerja	15
Tabel 3.1	Realisasi Belanja.....	16
Tabel 5.1	Pendapatan Asli Daerah.....	24
Tabel 5.2	Pendapatan Retribusi Daerah.....	25
Tabel 5.3	Rincian Belanja.....	27
Tabel 5.4	Belanja Operasi.....	27
Tabel 5.5	Belanja Pegawai.....	28
Tabel 5.6	Belanja Barang dan Jasa	29
Tabel 5.7	Belanja Modal.....	30
Tabel 5.8	Belanja Peralatan dan Mesin	31
Tabel 5.9	Belanja Gedung dan Bangunan	32
Tabel 5.10	Surplus/(Defisit)	32
Tabel 5.11	Pendapatan-LO	33
Tabel 5.12	Rincian Beban.....	34
Tabel 5.13	Mutasi Aset Lancar.....	35
Tabel 5.14	Rincian Persediaan.....	37
Tabel 5.15	Aset Tetap.....	37
Tabel 5.16	Mutasi Aset Tetap.....	38
Tabel 5.17	Mutasi Aset Lainnya.....	39
Tabel 5.18	Kewajiban.....	40
Tabel 5.19	Ekuitas	41
Tabel 6.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	43
Tabel 6.2	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 6.3	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan	43
Tabel 6.4	Jumlah PNS berdasarkan Jabatan	44
Tabel 6.5	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Penjurusan	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Stock Opname
2. Daftar Persediaan
3. Rekening Listrik dan Air Bulan Desember 2022
4. Rekening PJU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196911221992031004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

de Reken	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	4 / 3) *	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.963.870.000	875.164.664,31	44,563	748.258.300,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.963.870.000	875.164.664,31	44,563	748.258.300,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.963.870.000	875.164.664,31	44,563	748.258.300,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.963.870.000	875.164.664,31	44,563	748.258.300,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.963.870.000	875.164.664,31	44,563	748.258.300,00
5	BELANJA DAERAH	19.931.119.812	19.520.391.252,00	97,94	21.796.461.981,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.405.729.444	18.995.653.252,00	97,89	20.983.281.011,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.912.561.564	3.686.601.373,00	94,22	3.930.594.587,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.493.167.880	15.309.051.879,00	98,81	17.052.686.424,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	19.405.729.444	18.995.653.252,00	97,89	20.983.281.011,00
5.2	BELANJA MODAL	525.390.368	524.738.000,00	99,88	813.180.970,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.360.968	227.208.000,00	99,93	690.787.970,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	208.029.400	207.580.000,00	99,78	122.393.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.000.000	89.950.000,00	99,94	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	525.390.368	524.738.000,00	99,88	813.180.970,00
	JUMLAH BELANJA	19.931.119.812	19.520.391.252,00	97,94	21.796.461.981,00
	SURPLUS/DEFISIT	-17.967.249.812	-18.645.226.587,69	103,77	-21.048.203.681,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-17.967.249.812	-18.643.889.287,69	103,77	-21.048.203.681,00

Praya, Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 19691122 199201 1 003

**LAPORAN OPERASIONAL
(LO)**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

AKUN AKRUAL	URAIAN	DINAS ..			
		SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
4	PENDAPATAN DAERAH-LO	875.164.664,31	748.258.300,00	126.906.364,31	0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	875.164.664,31	748.258.300,00	126.906.364,31	0
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	875.164.664,31	748.258.300,00	126.906.364,31	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	-	-	-	0
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	-	-	-	0
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-ud	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	875.164.664,31	748.258.300,00	126.906.364,31	0
5	BEBAN DAERAH				
5.1	BEBAN OPERASI	22.580.036.351,01	23.417.528.637,66	- 837.492.286,65	0
5.1.1	Beban Pegawai	3.778.718.722,00	3.930.594.587,00	- 151.875.865,00	
5.1.2	Beban Barang dan Jasa	16.028.428.674,00	17.217.244.862,00	- 1.188.816.188,00	
5.1.3	Beban Bunga	-	-	-	-
5.1.5	Beban Hibah	500.450.000,00	-	500.450.000,00	
5.1.6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Beban Penyisihan	-	-	-	-
	Beban Lain-lain	-	-	-	-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.272.438.955,01	2.269.689.188,66	2.749.766,35	
	Beban Transfer/Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Beban Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	22.580.036.351,01	23.417.528.637,66	(837.492.286,65)	0
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	(21.704.871.686,70)	(22.669.270.337,66)	964.398.650,96	0
SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL					
	SURPLUS NON OPERASIONAL	-	- 0	- 0	0
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	-	-	-	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -	-	-	-	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek -	-	-	-	-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - L	-	-	-	-
	DEFISIT NON OPERASIONAL	85.973.498,00	-	85.973.498,00	0
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - L	-	-	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LC	85.973.498,00	-	85.973.498,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(85.973.498,00)	-	(85.973.498,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21.790.845.184,70)	(22.669.270.337,66)	878.425.152,96	0
POS LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
5.3.1.01.01	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	- 0	- 0	0
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(21.790.845.184,70)	(22.669.270.337,66)	878.425.152,96	0

Kabupaten Lombok Tengah,
 Januari 2023
 Kepala Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN

H. SUPARDAN S.Sos. M.Si.
 19691122 199201 1 003

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021

(Dalam Ribu)

NO	URAIAN	2022	2021
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di BLUD	-	-
7	Setara Kas	-	-
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
9	Kas di Bendahara BOS	-	-
10	Kas lainnya	-	-
11	Piutang Pendapatan	-	-
12	Piutang Pajak Daerah	-	-
13	Piutang Retribusi Daerah	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
15	Piutang Lain-lain PAD	-	-
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
17	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
18	Piutang Lainnya	-	-
19	Uang Muka Pekerjaan	-	-
20	Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
21	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-
23	Persediaan	90.818.992,00	43.978.500
24	JUMLAH ASET LANCAR	90.818.992,00	43.978.500,00
25			
26	ASET TETAP		
27	Tanah	1.752.550.000,00	2.253.000.000
28	Peralatan dan Mesin	14.588.856.146,61	14.361.922.647
29	Gedung dan Bangunan	4.385.506.996,23	4.286.088.996
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.484.351.880,00	21.394.401.880
31	Aset Tetap Lainnya	-	-
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
33	Akumulasi Penyusutan	(15.344.638.692,67)	(13.083.471.605)
34	JUMLAH ASET TETAP	26.866.626.330,17	29.211.941.918
35			
36	ASET LAINNYA		
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
38	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
39	Aset Tidak Berwujud		
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
41	Aset Lain-lain	99.493.340,00	99.493.340
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
43	JUMLAH ASET LAINNYA	99.493.340,00	99.493.340,00
44			
45	JUMLAH ASET	27.056.938.662,17	29.355.413.758,18
46			
47	KEWAJIBAN		
48	Kewajiban Jangka Pendek		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	-
50	Utang Bunga	-	-
51	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
52	Utang Belanja	2.056.258.355,00	1.210.083.719
53	Utang Transfer	-	-
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.056.258.355,00	1.210.083.719
56			
57	JUMLAH KEWAJIBAN	2.056.258.355,00	1.210.083.719
58	EKUITAS		
59	EKUITAS	25.000.680.307,17	28.145.330.039
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.056.938.662,17	29.355.413.758,18

Praya, Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN
196911221992011003

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 1 DESEMBER 2022 dan 2021

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	28.145.330.039	29.766.396.695,84
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(21.790.845.185)	(22.669.270.337,66)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(10.916.635)	-
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	-
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	(10.916.635,00)	-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	18.657.112.087,69	21.048.203.681,00
4	EKUITAS AKHIR	25.000.680.307,17	28.145.330.039,18

....., Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan



H. SUBARDAN, S.Sos. M.Si.
9691122.199201 1 003

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Dinas Perhubungan Kabupaten

Lombok Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010).

Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 :*Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun*

dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);

- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- e. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- j. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 entan Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Semester II Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan –LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan – LO

5.2.2. Beban

5.3. Pos-pos laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4. Pos-pos Neraca

5.4.1. Aset

5.5. Pengungkapan atas pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII. Penutup

Lampiran

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN KINERJA APBD

2. 1. Kebijakan Keuangan

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menetapkan indikator pencapaian target kinerja yaitu :

Tabel 2.1 Indikator Pencapaian Tingkat Kinerja

No.	Program	Sasaran	Indikator
A	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar – Urusan Perhubungan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaporan capaian kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya keselamatan dan ketertiban perijinan pelayaran	Persentase penerbitan PAS kecil Angkutan laut

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada bulan Desember Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 19.931.119.812,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp 19.405.729.444,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 525.390.368,00 yang direalisasikan dalam 3 (tiga) program dan 16 (enam belas) kegiatan.

Realisasi belanja secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dirinci seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Operasi	19,405,729,444.00	18,995,653,252.00	410,076,192.00	97,89
2	Belanja Modal	525,390,368.00	524,738,000.00	652,368.00	99,88
Jumlah		19,931,119,812.00	19,520,391,252.00	410,728,560	97,94

Sumber: Laporan Realisasi TA. 2022 Dishub

Dari Tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mencapai angka Rp 19.520.391.252,0 dari anggaran sebesar Rp 19.931.119.812,00 atau mencapai 97,94% yang uraian selengkapnya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dari laporan ini.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencapai angka 97,94%. Pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 19,931,119,812.00 mengalami penurunan anggaran dari tahun 2021, dimana besaran pagu anggaran tahun 2021 adalah Rp 21.994.280.848,00 atau terjadi pengurangan sebesar 14,87%.

Pemangkasan anggaran tersebut berakibat pada tidak dapat tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga dengan tidak tercapainya beberapa target tersebut pada Tahun Anggaran 2022 maka kami berkomitmen untuk menganggarkan kembali beberapa target yang telah ditetapkan tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Basis Akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas SKPD. Basis kas untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan

nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut :

- Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.3.13 Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD. Oleh karena itu SKPD menyelenggarakan sistem Akuntansi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. CaLK.

5.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Dari target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 1.963.870.000,00 dapat terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 875.164.664,31 atau sebesar 44,56%. Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi	1,963,870,000.00	875.164.664,31	44,56
3	Lain-lain PAD yang Sah	-		
Jumlah		1,963,870,000.00	875.164.664,31	44,56

Sumber: LRA Dishub TA 2022

Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak terdapat pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, sehingga tidak ada realisasi untuk Pajak Daerah.

b) Retribusi Daerah

Dari target pendapatan retribusi daerah yang dianggarkan sebesar Rp 1.963.870.000,00 dapat terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 875.164.664,31 atau sebesar 44,56 %. Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Retribusi Jasa Umum</i>	<i>1,060,270,000.00</i>	<i>875,164,664.31</i>	<i>44,56</i>
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	554,370,000.00	224,729,000.00	40,54
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505,900,000.00	650,435,664.31	128,57
2	<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	<i>903,600,000.00</i>	-	
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	903,600,000.00	-	
Jumlah		1,963,870,000.00	875,164,664.31	44,56

Sumber: LRA Dishub TA 2022

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu :

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Dari target sebesar Rp 554.370.000,00 pencapaian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 224.729.000,00 atau sebesar 40,54%. Beberapa kendala yang dihadapi pada pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini antara lain:

- Beberapa titik parkir pada tempat-tempat wisata dikelola langsung oleh Desa, Dinas/Instansi lain, maupun oleh kelompok masyarakat tertentu dan setoran parkirnya tidak diserahkan ke Dinas Perhubungan.
- Maraknya parkir liar. Untuk meminimalisir hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah melalui Bidang Teknik dan Angkutan Umum terus melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban secara rutin.
- Perbup No. 35 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir belum berlaku secara maksimal pada tahun 2022. Diharapkan dengan berlakunya Perbup ini maka seluruh titik parkir yang ditetapkan dalam Perbup tersebut dapat dipungut retribusinya secara lebih optimal

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Pencapaian perolehan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 128,57% atau Rp 650.435.664,31 dari anggaran sebesar Rp 505.900.000,00. Hal ini menunjukkan peningkatan positif dari retribusi pengujian kendaraan bermotor karena dampak dari adanya event internasional dimana setiap kendaraan dari luar daerah yang memasuki kendaraan dikawasan KEK Mandalika harus lulus uji KIR. Karena tidak beroperasinya UPTD. Lombok Timur sehingga banyak kendaraan yang melakukan numpang Uji pada UPTD. Kabupaten Lombok Tengah

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu :

- Retribusi Tempat Khusus Parkir

Dari target Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp 903.600.000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum terdapat realisasi retribusi parkir tempat khusus, karena Tempat Khusus Parkir yang dimaksud akan dipihak ketiga-kan dan akan berubah menjadi pajak parkir.

5.1.2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp 19.931.119.812,00 berhasil tercapai realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 19.520.391.252,00 atau sebesar 97,94% dengan sisa anggaran sebesar Rp 410.728.560,00 atau sebesar 2,06%.

Adapun rincian Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rincian Belanja per 31 Desember 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Operasi	19,405,729,444.00	18,995,653,252.00	410,076,192.00	97,89
2	Belanja Modal	525,390,368.00	524,738,000.00	652,368.00	99,88
Jumlah		19,931,119,812.00	19,520,391,252.00	410,728,560.00	97,94

Sumber: LRA Dishub TA 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Rincian Belanja terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Anggaran Belanja Operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp19.405.729.444,00 dengan nilai realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp 18.995.653.252,00 atau sebesar 97,89%. Realisasi Belanja Operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Belanja Operasi per 31 Desember 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3,912,561,564.00	3,686,601,373.00	225,960,191	94,22
2	Belanja Barang dan Jasa	15,493,167,880.00	15,309,051,879	184,116,001	98,81
Jumlah		19,405,729,444.00	18,995,653,252	410,076,192	97,89

Sumber: LRA Dishub TA 2022

Realisasi Belanja Operasi di atas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 ini terdiri atas Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.686.601.373,00 dari target anggaran sebesar Rp 3.912.561.564,00 atau mencapai 94,22% yang diuraikan pada Tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5 Belanja Pegawai per 31 Desember 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	<i>Gaji dan Tunjangan</i>	2.577,077,317,00	2,569,017,617,00	8,059,700.00	99,69
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,978,940,453.00	1,976,586,476.00	2,353,977.00	99,88
	Tunjangan Keluarga	233,847,927.00	232,490,380.00	1,357,547.00	99,42
	Tunjangan Jabatan	140,305,500.00	139,300,000.00	1,005,500.00	99,28
	Tunjangan Fungsional	7,576,500.00	5,885,000.00	1,691,500.00	77,67
	Tunjangan Fungsional Umum	72,585,000.00	72,585,000.00	0,00	100
	Tunjangan Beras	140,118,216.00	138,467,040.00	1,651,176	98,82
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	3,671,385.00	3,671,385.00	0,00	100
	Pembulatan Gaji	32,336.00	32,336.00	0,00	100
2	<i>Tambahan Penghasilan PNS</i>	1,230,318,747.00	1,087,437,456.00	142,881,291.00	88,39
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1,230,318,747.00	1,087,437,456.00	142,881,291.00	88,39
3	<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</i>	98,193,500.00	23,174,300.00	75,019,200.00	23,60
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27,718,500.00	0,00	0,00	-
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	25,295,000.00	23,174,300.00	2,120,700.00	91,62

	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tempat khusus parkir	45,180,000.00	0,00	0,00	-
4	<i>Beban Honorarium</i>	6,972,000.00	6,972,000.00	0,00	-
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,972,000.00	6,972,000.00	0,00	100
Jumlah		3,912,561,564.00	3,686,601,373.00	225,960,191.00	94,22

Sumber: LRA Rinci TA 2022

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp15.493.167.880,00 berhasil terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.309.051.879,00 atau sebesar 98,81%. Belanja Barang dan Jasa terdiri atas Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, serta Honorarium PNS dan Non PNS. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut ini:

Tabel 5.6 Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145,305,928,00	3,046,273,250.00	99,032,678.00	96,85
2	Belanja Jasa Kantor	11,599,183,252.00	11,590,540,639.00	8,642,613.00	99,93
3	Belanja jasa Kontruksi	4,535,200.00	4,450,000.00	85,200.00	98,12
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	48,349,500.00	4,770,000.00	43,579,500.00	9,87
5	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	299,900,000.00	297,160,000.00	2,740,000.00	99,09
6	Biaya Sewa Gedung dan Bangunan	3,000,000.00	3,000,000.00	0,00	100

7	Belanja Iuran jaminan/asuransi	13,968,000.00	12,804,000.00	1,164,000.00	91,67
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	378,926,000.00	350,053,990.00	28,872,010.00	92,38
Jumlah		15,493,167,880.00	15,309,051,879.00	184,116,001.00	98,81

Sumber: LRA Rinci Dishub TA 2022

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terlihat bahwa realisasi Belanja Barang dan Jasa secara rata-rata mencapai 98,81%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan 30 aset. Anggaran Belanja Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 525.390.368,00 dengan jumlah realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 524.738.000,00 atau mencapai 99,88%. Adapun rincian dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini:

Tabel 5.7 Belanja Modal per 31 Desember 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	227,360,968.00	227,208,000.00	152,968.00	99,93
2	Belanja Bangunan dan Gedung	208,029,400.00	207,580,000.00	449,400.00	99,78
3	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	90,000,000.00	89,950,000.00	50,000.00	99,94
Jumlah		525,390,368.00	524,738,000.00	652,368	99,88

Sumber: LRA Dishub TA 2022

Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022 ini terdiri atas Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, irigasi dan jaringan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 227.360.968,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dapat terealisasi sebesar Rp 227.208.000,00 atau mencapai 99,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pengadaan Mesin Absensi Iris/Retina	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100
	Pengadaan Mesin Absensi Iris/Retina	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100
2	Pengadaan Alat Komputer	30,000,000.00	30,000,000.00		100
	Laptop	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100
2	Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	3.500.000,00	3,500,000.00	-	100
	Pengadaan Printer (1 buah)	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100
3	Pengadaan Alat Rumah Tangga	16,140,968.00	16,058,000.00	82,968	99,49
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	3,898,218.00	3,898,318.00	-	100
	Pengadaan Kursi Plastik	12,242,650.00	12,160,000.00	82,650.00	99,32
4	Pengadaan Alat Kantor	67,000,000.00	67,000,000.00	-	100
	Pengadaan Printer Smartcard (1 unit)	37,000,000.00	37,000,000.00	-	100
	Perangkat RFID	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100
5	Pengadaan Rambu Bersuar	102,720,000.00	102,650,000.00	70,000.00	99,93
	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu lintas Darat	102,720,000.00	102,650,000.00	70,000.00	99,93
	Jumlah	227,360,968.00	227,208,000.00	152,000.00	99,93

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa realisasi fisik pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sudah mencapai 100% per 31 Desember 2022 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,93%.

2. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 205.810.000,00 dari anggaran sebesar Rp 208.029.400,00 atau mencapai 98,93%. Adapun rincian dari Belanja Gedung dan Bangunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut ini:

Tabel 5.9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Pengadaan modal bangunan toilet kantor	29,917,200.00	27,900,000.00	2,017,200.00	93,25
	Pengadaan bangunan toilet kantor	27,900,000.00	27,900,000.00	-	100
	Biaya Perencanaan	1,118,400.00	1,100,000.00	84,000.00	98,35
	Biaya Pengawasan	838,800.00	830,000.00	8,800.00	98,95
2	Pengadaan modal gedung bangunan	178,112,200.00	177,910,000.00	202,200.00	99,88
	Biaya Penembokan halaman Terminal Mujur	166,460,000.00	166,460,000.00	-	100
	Biaya Perencanaan	6,658,400.00	6,500,000.00	158,400.00	97,62
	Biaya Pengawasan	4,993,800.00	4,950,000.00	43,800.00	99,12
	Jumlah	208,029,400.00	207,580,000.00	2,219,400.00	99,78

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa realisasi fisik pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,78%.

5.1.3. Surplus/Defisit

Dari perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp16,758,768,268.00 yang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut ini:

Tabel 5.10 Surplus/(Defisit) per 31 Desember 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan	1,963,870,000.00	875,164,664.31	44,56	748,258,300.00
2	Belanja	19,931,119,812.00	19,520,391,252.00	97,94	21,796,461,981.00
	Surplus/(Defisit)	(17,967,249,812.00)	(18,645,226,587.69)	(103,77)	(21.047.502.367,00)

Sumber: LRA Dishub TA 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2022 terjadi defisit anggaran sebesar Rp18.645.226.587,69 dari yang direncanakan sebesar Rp17.967.249.812,00

5.2. Pos-Pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah semua hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berupa Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang hingga tanggal 31 Desember 2022 dapat terealisasi sebesar Rp 875.164.664,31 yang dapat diuraikan pada Tabel 5.11 berikut ini:

Tabel 5.11 Pendapatan-LO per 31 Desember 2022

No	Uraian	LRA	LO
1	Pendapatan Pajak	-	-
2	Pendapatan Retribusi	875,164,664.31	875,164,664.31
	Retribusi Jasa Umum	875,164,664.31	875,164,664.31
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	224,729,000.00	224,729,000.00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	650,435,664.31	650,435,664.31
	Retribusi Jasa Usaha		
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	
3	Lain-lain PAD yang Sah		
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)		
	Kerugian Uang		
	Jumlah	875,164,664.31	875,164,664.31

Sumber: LO Dishub TA 2022

5.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban (PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013). Beban pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dapat diuraikan pada Tabel 5.12 berikut ini:

Tabel 5.12 Rincian Beban per 31 Desember 2022

No	Uraian	SALDO 2022	SALDO 2021
1	Pendapatan - LO	875,164,664.31	748,258,300.00
2	Beban	18,995,653,252,00	23.417.528.637,66
	Beban Pegawai – LO	3,778,718,722.00	3,930,594,587.00
	Beban Barang dan jasa	16,028,428,674.00	17,217,244,862.00
	Beban Hibah	500,450,000.00	
	Beban Penyusutan dan amortisasi	2,272,438,955.01	2,269,689,188.66
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	905.914.441,01	904.869.983,66
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	83.435.951,00	82,645,971.00
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	1.283.088.563,00	1,281,439,480.00
	Surplus/Defisit dari Operasi	(18.120.488.587.69)	(22,669,270,337.66)

Sumber: LO Dishub TA 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa per tanggal 31 Desember 2022 jumlah Pendapatan-LO adalah sebesar Rp 875,164,664.31 sedangkan jumlah Beban adalah Rp 18,995,653,252,00 sehingga terjadi defisit dari operasi sebesar Rp 18,120,488,587.69

5.3. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2022 terdapat ekuitas awal sejumlah Rp 28,145,330,039.00 yang berasal dari jumlah ekuitas tahun 2021, karena terdapat Defisit-LO sebesar Rp 21,790,845,185.00 dan koreksi nilai aset tetap sebesar Rp.10,916,635.00 dengan R/K PPKD sebesar Rp. 18,657,112,087.69 maka jumlah ekuitas akhir Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 25,000,680,307.17.

5.4. Pos-Pos Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp 27.056.938.662,17 dan Rp 29.355.413.758,18 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Perhubungan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 90.818.992,00 dan Rp 43.978.500,00 yang dapat dijelaskan pada Tabel 5.13 berikut ini:

Tabel 5.13 Mutasi Aset Lancar per 31 Desember 2022

Jenis Aset Lancar	Saldo 2022	Aset Lancar		Saldo 2021
		Tambah	Kurang	
Kas dan Setara Kas			-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran			-	-

Jenis Aset Lancar	Saldo 2022	Aset Lancar		Saldo 2021
		Tambah	Kurang	
Piutang Pendapatan	-	-	-	-
Piutang Lainnya				
Uang Muka Kerja				
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-
Persediaan	90.818.992,00	90.818.992,00	43,978,500.00	43,978,500.00
Jumlah Aset Lancar	90.818.992,00	90.818.992,00	43,978,500.00	43,978,500.00

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2022

✓ **Kas di Bendaharan Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

✓ **Piutang Pendapatan**

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk Tahun Anggaran 2022 ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki piutang pendapatan.

✓ **Piutang Lainnya**

Piutang Lain-lain pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00

✓ **Persediaan**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 90.818.992,00 dan Rp 43.978.500,00. Nilai persediaan ini ditentukan

berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14 Rincian Persediaan per 31 Desember 2022

No	Jenis Persediaan	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Persediaan ATK	1,393,992.00	203.500,00
2	Barang Cetak	89,425,000.00	43.775.000,00
Jumlah		90.818.992.00	43.978.500,00

Sumber: Lap. Stock Opname Dishub TA 2022

Persediaan terdiri atas Persediaan ATK dan Persediaan Barang Cetak/Kuasi yang rincian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 26.866.626.330,17 dan Rp 29.211.941.918,18. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdapat pada Dinas Perhubungan yang rinciannya dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.15 Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Uraian	SALDO 2022	SALDO 2021
1	Tanah	1,752,550,000.00	2,253,000,000.00
2	Peralatan dan Mesin	14,588,856,146.61	14,361,922,646.61
3	Gedung dan Bangunan	4,385,506,996.23	4,286,088,996.23
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,484,351,880.00	21,394,401,880.00
5	Aset Tetap Lainnya	-	
6	Akumulasi Penyusutan	0,00	(13,082,471,604.66)
Jumlah		26,866,626,330.17	29.211.941.918,18

Sumber: Neraca Dishub TA 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 26.866.626.330,17. Dari Tabel di atas juga terlihat bahwa Aset Peralatan dan Mesin mengalami reklas dari Aset Gedung dan Bangunan yang nilainya diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.16 Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Saldo 2022	Aset Tetap		Saldo 2021
		Tambah	Kurang	
Tanah	1,752,550,000.00	-	-	2,253,000,000.00
Peralatan dan Mesin	14,588,856,146.61	255,545,500.00		14,361,922,646.61
Gedung dan Bangunan	4,385,506,996.23	207,580,000.00		4,286,088,996.23
Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,484,351,880.00	89,950,000.00		21,394,401,880.00
Aset Tetap Lainnya				-
Akumulasi Penyusutan	(15.344.638.692,67)	39.609.367,00	2.300.776.455,01	(13,083,471,604.66))
Jumlah Aset Tetap	26,866,626,330.17	553,075,500.00		29,211,941,918.18

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2022

Mutasi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Pada Tahun Anggaran 2022 Semester II, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menghibahkan tanah Terminal Renteng ke Pemprov senilai Rp500.450.000,00 sehingga mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu Rp 1,752,550,000.00.

2) Peralatan Mesin

Untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, per 31 Desember 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengalami penambahan aset sebesar Rp 255.545.500 dan pengurangan sebesar 28.612.000,00 yang rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.17

3) Gedung dan Bangunan

Untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan, per 31 Desember 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengalami penambahan asset sebesar Rp207.580.000,00 dan pengurangan sebesar 108.162.000,00 yang rinciannya telah diuraikan pada Tabel 5.17.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, per 31 Desember 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengalami penambahan asset sebesar Rp89.950.000,00 yang rinciannya telah diuraikan pada Tabel 5.17.

c. Aset Lainnya

Jumlah asset lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 99.493.340,00 dimana tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 99.493.340,00 per 31 Desember 2021. Perubahan jumlah asset lainnya tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.17 Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022

Jenis Aset Lainnya	Saldo 2022	Aset Lainnya		Saldo 2021
		Tambah	Kurang	
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
Aset Lain-lain		-	-	99.493.340,00
Aset Lain-lain Rusak Berat	67.843.340,00			67.843.340,00
Detail Engineering Design (DED)	31.650.000,00			31.650.000,00

Jenis Aset Lainnya	Saldo 2022	Aset Lainnya		Saldo 2021
		Tambah	Kurang	
Barang yang diserahkan kpd masyarakat				
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-			-
Jumlah Aset Lainnya	99.493.340,00			99.493.340,00

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2022

5.4.2. Kewajiban

Kewajiban atau yang disebut juga dengan istilah Hutang terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan di masa mendatang dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar dan memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Sedangkan Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya relatif lama. Kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.18 berikut ini:

Tabel 5.18 Kewajiban per 31 Desember 2022

Jenis Kewajiban	Saldo 2022	Kewajiban		Saldo 2021
		Tambah	Kurang	
Kewajiban Jangka Pendek	2,056,258,355.00	2,056,258,355.00	1,210,083,719.00	1,210,083,719.00
Utang Belanja Pegawai	92.117.349,00	92.117.349,00	0,00	0,00
Utang Barang dan jasa	1.964.141.006,00	1.964.141.006,00	1,210,083,719.00	1,210,083,719.00
Jumlah Kewajiban	2,056,258,355.00	2,056,258,355.00	1,210,083,719.00	1,210,083,719.00

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa per 31 Desember 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp 2,056,258,355.00. yang merupakan kewajiban atas pembayaran biaya listrik PJU dan

Biaya listrik, air dan telepon kantor untuk Bulan Desember 2022 yang terbayar pada Bulan Januari 2023.

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana pada Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 25,000,680,307.17 yang merupakan selisih antara nilai aset sebesar Rp. 29,927,217,234.18 dan nilai kewajiban sebesar Rp 28,145,330.039.00. Secara rinci jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 akan diuraikan pada Tabel 5.20 berikut ini:

Tabel 5.19 Ekuitas per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo 2022	Mutasi		Saldo 2021
		Tambah	Kurang	
Aset	27,056,938,662.17	217,037,239.00	43,978,500.00	29,356,147,512.18
Aset Lancar	90,818,992.00		43,978,500.00	43,978,500.00
Aset Tetap	26,866,626,330.17	133,248,000.00		21,211,941,918.18
Aset Lainnya	99,493,340.00			99,493,390.00
Kewajiban	2,056,258,355.00	917,103,303.00	1,210,083,719.00	1,210,083,719.00
Kewajiban Jangka Pendek	2,056,258,355.00	917,103,303.00	1,210,083,719.00	1,210,083,719.00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas dan Kewajiban	27,056,938,662.17	1,134,140,542.00	1,254,017,219.00	28,145,330,039.18

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2022

5.5. Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD -- (NIHIL).

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan umum di sektor Perhubungan. Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan.
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan.
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas: 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubbag, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala UPT, dan 1 (satu) orang KTU UPT.

6.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber daya aparatur perhubungan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dianalisa dari dua sisi, yaitu dari sisi kuantitas dan sisi kualitas.

Dari kuantitas yang ada, pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat digambarkan seperti pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan per 31 Desember 2022

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	IV	3	6,97%
2.	III	23	55,81%
3.	II	16	37,22%
4.	I		
Jumlah		42	100%
5.	PTT (SK Bupati)	4	
6.	PTT (SK Kepala Dinas)	97	
Total		143	

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Tabel 6.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Laki	35	83,33 %
2.	Perempuan	7	16,67 %
TOTAL		42	100,00 %

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Sedangkan secara kualitas, pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat digambarkan seperti pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan per 31 Desember 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	S.2	2	4,6 %
2.	S.1	18	44,18 %
3.	D.III	4	9,3%
4.	D.II	2	4,6%
5.	D.1	-	-
6.	SLTA	15	34,88 %
7.	SLTP	1	2,3%
8	SD	-	-
TOTAL		42	100 %

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Tabel 6.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Eselon II.b	1	2,32%
2.	Eselon III.a	1	2,32%
3.	Eselon III.b	2	4,65%
4.	Eselon IV.a	7	16,28%
5.	Eselon IV.b	1	2,32%
6.	Fungsional Tertentu	1	2,32%
7.	Fungsional Umum	29	69,77%
TOTAL		43	100,00%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Tabel 6.5. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan Penjenjangan per 31 Desember 2022

No	Jenis Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Adum/Diklat. Pim.IV	6	
2.	Adumla	-	
3.	Spama/Diklat Pim.III	2	
4.	Spamen/Diklat Pim.II	-	
TOTAL		8	

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Dari Tabel-tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 143 orang yang terdiri atas 42 orang PNS dan 4 orang tenaga Honorer. Berdasarkan jenis kelamin, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 83,33%. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, struktur pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata satu (S1), yaitu sebesar 42,18%, disusul secara berturut-turut oleh SLTA sebesar 34,88%, S2 sebesar 4,6%, DII sebesar 4,6%, DIII sebesar 9,3%, dan terakhir oleh jenjang pendidikan SLTP sebesar 2,3%.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat mendukung upaya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini.

Praya, Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196911221992031004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 001/DISHUB-BPK/TU-PJU/2023
Tanggal : 25 Januari 2023

Pemerintahan : 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Umum
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

di diterima dari Bendahara Pengeluaran, uang sejumlah Rp 1.953.082.176,00
Salang : **Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah**

Untuk pembayaran

Program : 2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kategori : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Rekening : 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan
Untuk Keperluan : Bayar biaya tagihan listrik PJU untuk bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 pada PPOB Tata Cahaya Lombok

Yang berhak menerima pembayaran
Nama : Nasri
Alamat : Praya - Loteng

Informasi Potongan Pajak

Menerima uang,

METERAI TEMPEL
 116465847
NASRI

Bendahara Pengeluaran

MAFIRA GITA APRILIANI, SE
 NIP. 19940404 202012 2 021

Praya, 25 Januari 2023
 Kepala Dinas

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19691127 199203 1 004

BANK SYARIAH BUKITPIL
TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
#BSPAA44269LBKTC

IDPEL : 441400034793
NAMA : DINAS PERHUBUNGAN
TARIF/DAYA : P1/16500 VA
BL/TH : JAN23
TGL BAYAR : 2023-01-17 10:55:27
STAND METER : 00101924-00103168
RP TAG PLN : Rp. 4.395.083
MIN BANK : Rp. 2.800
TOTAL BAYAR : Rp. 4.397.883
REF : 0MUC213519694749EADA42F820597863

7661125998/DPS/CA/
17012023/105729/OL

BANK SYARIAH BUKITPIL
TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA/44BSPA44269LBKTC

TGL BAYAR : 2023-01-17 10:55:27

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 441400034793
NAMA : DINAS PERHUBUNGAN
TARIF/DAYA : P1/16500 VA
RP TAG PLN : Rp. 4.395.083
NO REF : 0MUC213519694749EADA42F820597863
BL/TH : JAN23
STAND METER : 00101924-00103168

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 2.800
TOTAL BAYAR : Rp. 4.397.883

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123
Atau
Hub PLN Terdekat :"

477661125998/DPS/CA/17012023/105729/OL

Disini menerima pembayaran PBB wilayah Jateng dan Jabar

BANK BSB
TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
#BSPA44269LBKTC

IDPEL : 441400554721
NAMA : GEDUNG PENGUJIAN
TARIF/DAYA : P1/33000 VA
BL/TH : JAN23
TGL BAYAR : 2023-01-17 10:55:31
STAND METER : 00004781-00005261
RP TAG PLN : Rp. 4.703.380
MIN BANK : Rp. 2.800
TOTAL BAYAR : Rp. 4.706.180
REF : 0MUC213517307759359A6280F1567443

4012596573/DPS/CA/
17012023/105732/OL

BANK BSB
TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA/44BSPA44269LBKTC

TGL BAYAR : 2023-01-17 10:55:31

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 441400554721
NAMA : GEDUNG PENGUJIAN
TARIF/DAYA : P1/33000 VA
RP TAG PLN : Rp. 4.703.380
NO REF : 0MUC213517307759359A6280F1567443
BL/TH : JAN23
STAND METER : 00004781-00005261

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 2.800
TOTAL BAYAR : Rp. 4.706.180

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123
Atau
Hub PLN Terdekat :"

514012596573/DPS/CA/17012023/105732/OL

Disini menerima pembayaran PBB wilayah Jateng dan Jabar

BUKTI PDAM LOMBOK TENGAH

FEED509D72DA403E
0EBE59B52AE71

TGL BYR : 17-01-2023 10:57:33
NOMEN : 012101386
TAG : NOTAG
BLAN : Dec-2022
NAMA : GUDANG FARMASI

JUMLAH: Rp 164.978,00
DENDA : Rp 0,00
ADMIN : Rp 2.500,00
TOTAL : Rp 167.478,00

446SPA44269LBKTC/OPS/CA/17-01-2023/10:57:31

BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH

FEED509D72DA403E0C8EBE59B52AE71

TGL BYR : 17-01-2023 10:57:33
NOMEN : 012101386

BULAN : Dec-2022
NAMA : GUDANG FARMASI
JUMLAH : Rp 164.978,00
DENDA : Rp 0,00
ADMIN : Rp 2.500,00
TOTAL : Rp 167.478,00
TERBILANG : SERATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH

PEMAKATAN : 4136
METER AWAL : 4178
METER AKHIR : 42
JUMLAH : 42 M2

PDAM LOMBOK TENGAH MENYATAKAN RESI INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH.

446SPA44269LBKTC/OPS/CA/17-01-2023/10:57:31

BUKTI PDAM LOMBOK TENGAH

98BEECF25C0426E
09DF5BE1154922

TGL BYR : 17-01-2023 10:57:34
NOMEN : 072015106
TAG : NOTAG
BLAN : Dec-2022
NAMA : KTR. PENGUDIAN BERMOTOR

JUMLAH: Rp 47.380,00
DENDA : Rp 0,00
ADMIN : Rp 2.500,00
TOTAL : Rp 49.880,00

446SPA44269LBKTC/OPS/CA/17-01-2023/10:57:34

BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH

329BEECF25C0426EB409DF5BE1154922

TGL BYR : 17-01-2023 10:57:34
NOMEN : 072015106

BULAN : Dec-2022
NAMA : KTR. PENGUDIAN BERMOTOR
JUMLAH : Rp 47.380,00
DENDA : Rp 0,00
ADMIN : Rp 2.500,00
TOTAL : Rp 49.880,00
TERBILANG : EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH

PEMAKATAN : 3555
METER AWAL : 3555
METER AKHIR : 0
JUMLAH : 0 M2

PDAM LOMBOK TENGAH MENYATAKAN RESI INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH.

446SPA44269LBKTC/OPS/CA/17-01-2023/10:57:34



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Gajah Mada No. 116 Telp. (0370) 634719 Praya 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Nomor : 027 / 473 / HUB / 2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : H. Supardan, S.Sos.,M.,Si
Jabatan : Kepala Dinas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 31 Desember 2022 kepada :

Nama Lengkap : Baiq Risdawati
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan Kab Lombok Tengah

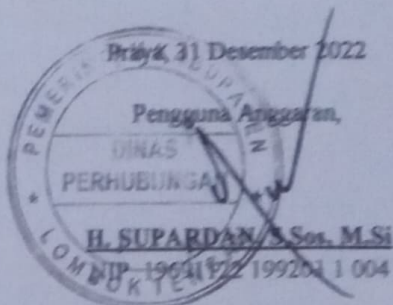
Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
					1,393,992.00
A	BARANG ATK				
1	Tinta Printer (Hitam)	2	bh	115,000.00	230,000.00
2	kertas F4 HVS putih	1	rim	57,992.00	57,992.00
3	catridge	2	bh	550,000.00	1,100,000.00
4	Trigonal Color Clips	2	pcs	3,000.00	6,000.00
B	BARANG KUASI				89,425,000
1	Kwitansi Retribusi PKB	13	bk	50,000	650,000.00
2	Smard Card	3551	bh	25,000	88,775,000.00
TOTAL JUMLAH ATK+BARANG KUASI					90,818,992

Demikian Berita Acara Stock Opname ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Barang,

BAIQ RISDAWATI
NIP. 19801231 200801 2 035



PELUNASAN TELKOM PAY

JAN23
17/01/2023
0172603801602
JUL KARNATH
0000
301A

Rp. 532.797,00
Rp. 2.500,00
Rp. 535.297,00
FC096C3DE92E479E
91C7E04093E0DD79

44269LBKTC/
TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA/OPS
023 105738/CA

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN TELKOM PAY

BLN TAGIHAN : JAN23
NO TLP : 0172603801602
NAMA PLG : JUL KARNATH
NWP : 0000
NO REF : 301A
RP TAGIHAN : Rp. 532.797,00
ADMIN : Rp. 2.500,00
TOTAL : Rp. 535.297,00
SWITCH REF : FC096C3DE92E479E91C7E04093E0DD79

TELKOM menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

TERIMA KASIH

44BSPA44269LBKTC/TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA/OPS
802847082109/17012023 105738/CA

PELUNASAN TELKOM PAY

JAN23
17/01/2023
0003706503089
SAHRUN QD DINAS PERHUBUNGAN
E
301A

Rp. 592.162,00
Rp. 2.500,00
Rp. 594.662,00
B6C5E126D01047EB
7503B52FD7A48572

44269LBKTC/
TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA/OPS
023 105742/CA

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN TELKOM PAY

BLN TAGIHAN : JAN23
NO TLP : 0003706503089
NAMA PLG : SAHRUN QD DINAS PERHUBUNGAN P
NWP : E
NO REF : 301A
RP TAGIHAN : Rp. 592.162,00
ADMIN : Rp. 2.500,00
TOTAL : Rp. 594.662,00
SWITCH REF : B6C5E126D01047EB7503B52FD7A48572

TELKOM menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

TERIMA KASIH

44BSPA44269LBKTC/TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA/OPS
516586381874/17012023 105742/CA

PELUNASAN TELKOM PAY

JAN23
17/01/2023
0003706502548
DINAS PERHUBUNGAN LOMBOK
TENG
01A

Rp. 604.950,00
Rp. 2.500,00
Rp. 607.450,00
D6F48E396654D58
AA9D06AD458228D

44269LBKTC/
TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA/OPS
023 105748/CA

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN TELKOM PAY

BLN TAGIHAN : JAN23
NO TLP : 0003706502548
NAMA PLG : DINAS PERHUBUNGAN LOMBOK TENG
NWP : A
NO REF : 301A
RP TAGIHAN : Rp. 604.950,00
ADMIN : Rp. 2.500,00
TOTAL : Rp. 607.450,00
SWITCH REF : D6F48E396654D58AA9D06AD458228D

TELKOM menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

TERIMA KASIH

44BSPA44269LBKTC/TATA CAHAYA LOMBOK PRAYA/OPS
377675015271/17012023 105748/CA